



**BAPPEDA
GROBOGAN**



grobogan
Kabupaten Grobogan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN T A H U N 2 0 2 4

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. S. Parman No. 23 Telp (2092) 421084 Fax (0292) 421084
purwodadi 58111



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan S. Parman Nomor 23, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon(0292) 421084 Faksimile (0292)421084,
Laman bappeda.grobogan.go.id, Posel bappeda@grobogan.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, 10 Februari 2025

Kepala Bappeda,

A circular official stamp of Kabupaten Grobogan Bappeda is overlaid with a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN' and 'BAPPEDA'.

Afi Wildani S.T., M. Eng.
Pembina Tk. I

NIP 19790805 200501 1 007

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan disusun dengan tujuan memberikan gambaran konkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Secara rata-rata capaian kinerja Bappeda pada tahun 2024 adalah Sangat Tinggi. Diketahui dari sejumlah 6 (enam) indikator sasaran strategis, semuanya memiliki realisasi diatas dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja. Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukkan bahwa secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan telah berhasil mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan. Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Grobogan tahun 2024 tergolong baik, hal ini terlihat dari anggaran APBD perubahan Bappeda sebesar Rp 11.855.754.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp 11.440.959.861,00 atau 96,50%. Seluruh sub kegiatan semuanya dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja ini akan menjadi bahan dalam perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang optimal dalam menjalankan peran sentral pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Grobogan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi Bappeda Kabupaten Grobogan atas penggunaan anggaran di Tahun 2024. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja serta evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Grobogan adalah untuk memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, relisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Grobogan ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kendala yang dihadapi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja

Bappeda Kabupaten Grobogan dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, 10 Februari 2025

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GROBOGAN**

AFI WEDANI, S.T.M.ENG

Pembina Tk I

NIP. 197908052005011007

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	I-3
C. Sumber Daya Manusia.....	I-9
D. Sarana dan Prasarana	I-12
E. Isu Strategis	I-15
F. Landasan Hukum	I-17
G. Sistematika Penyajian LKjIP	I-18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Rencana Kerja Tahun 2024	II-12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-1
A. Pengukuran Kinerja.....	III-1
B. Capaian Kinerja	III-3
C. Realiasi Keuangan	III-34
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. Kesimpulan	IV-1
B. Rekomendasi Tindak lanjut	IV-2

LAMPIRAN

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Berdasarkan Jenis Kelamin	I-10
Tabel 1.2	Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Kabupaten Grobogan Tahun 2024	I-11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan	I-11
Tabel 1.4	Prasarana dan Sarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024	I-12
Tabel 2.1	Matriks Tujuan, Sasaran berserta Indikator dan Target Kinerja Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026	II-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Grobogan.....	II-8
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2024 Bappeda Kabupaten Grobogan	II-12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024	II-14
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2024	II-16
Tabel 2.6	Perubahan program, Kegiatan, Subkegiatan Bappeda Kabupaten Grobogan	II-21
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	III-3
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024	III-4
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	III-6
Tabel 3.4	Perbandingan Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2024 dengan Target Menengah	III-8
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten Grobogan Tahun 2024	III-9

Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan atau Kegagalan IKU Bappeda Kabupaten Grobogan	III-10
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024	III-14
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program Kegiatan Bappeda Kabupaten Tahun 2024.....	III-28
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024	III-34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Bappeda kabupaten Grobogan..... I-9



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

BAB I | 

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk itu Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan, sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Grobogan. Rencana pembangunan daerah tersebut terwujud dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Selain sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Grobogan juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2024 sesuai tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk itu

dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja, Bappeda Kabupaten Grobogan akan menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dengan disertai realisasi indikator kinerja dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Grobogan tahun 2024 berdasarkan pada beberapa regulasi meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dalam hal ini adalah kepada Bappeda Kabupaten Grobogan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada intinya LKjIP menguraikan tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud, serta analisis mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan penelaahan terhadap rencana kinerja mencakup rencana strategis, rencana kerja tahunan, penelaahan terhadap dokumen perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Kabupaten Grobogan

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.”

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
2. merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
4. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

6. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. merumuskan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
10. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
11. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
12. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
13. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
14. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dan Musrenbangcam (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan), forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Musrenbang RKPD (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Musrenbang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Musrenbang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah);

15. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) dan Renja SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah) se-Kabupaten;
16. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
17. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan;
18. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pembinaan terhadap tugas-tugas kesekretariatan dan bidang teknis lainnya;
19. menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan menetapkan pelaksanaan penetapan indikator kinerja kegiatan pembangunan daerah;
20. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS APBD);
21. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta dan luar negeri;
22. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan urusan pemerintahan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan;
23. menetapkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Daerah;
24. menetapkan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan sebagai pertanggungjawaban sesuai visi, misi dan tujuan organisasi Badan;
25. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

26. mengkoordinasikan penyusunan penetapan indikator kinerja kegiatan Badan dan mengkoordinasikan penyusunan penetapan indikator kinerja Daerah;
27. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran, penyusunan neraca, arus kas dan catatan hasil laporan keuangan; dan
28. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
29. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
30. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
31. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda Kabupaten Grobogan , adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pengembangan

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada

semua unsur di lingkungan Badan, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Kepala Sub Bagian Umum.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan.
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan.

c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Bidang Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

d. Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi

Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang prasarana wilayah dan ekonomi meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, pertanahan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, penanaman modal,

koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan serta sumber daya mineral dan energi.

Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi terdiri atas :

- 1) Subkoordinator Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Pertanahan
- 2) Subkoordinator Bidang Perekonomian

e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri atas

- 1) Subkoordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

f. Kepala Bidang Pemerintahan, dan Sosial Budaya

Bidang Pemerintahan, dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, tenaga kerja, transmigrasi, ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

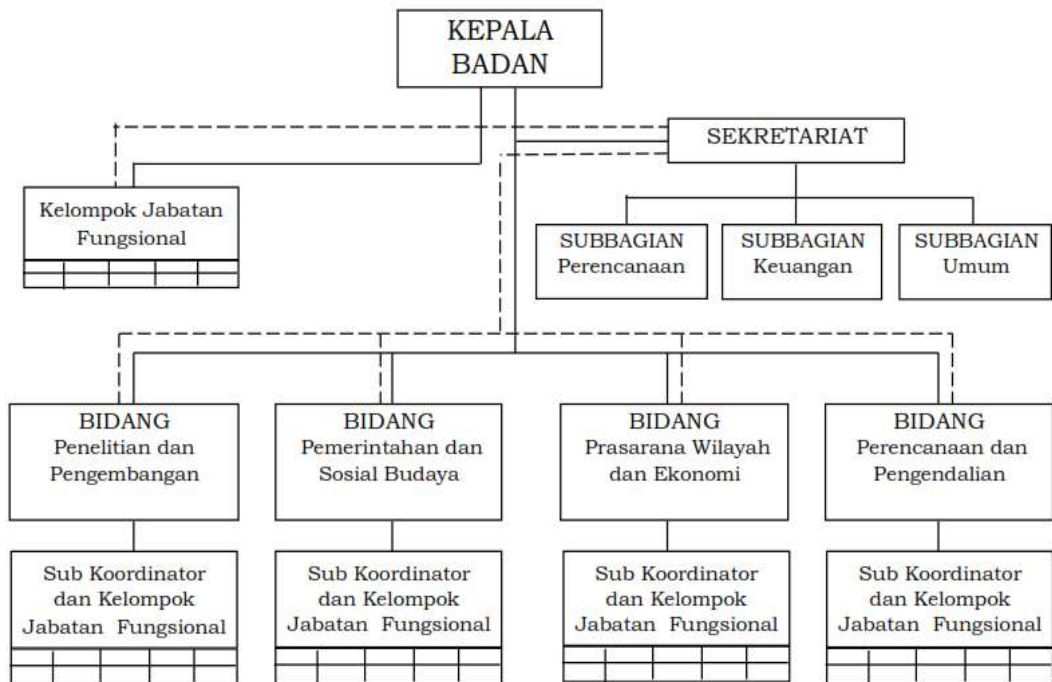
Pemerintahan, dan Sosial Budaya terdiri atas

- 1) Subkoordinator Bidang Kesejahteraan Sosial
- 2) Subkoordinator Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Disamping jabatan-jabatan struktural tersebut, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang ditempatkan pada semua bidang di Bappeda.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappeda Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Grobogan

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan telah didukung Sumber Daya Manusia yang memadai dan profesional sesuai dengan kompetensi dan tuntutan tugas yang diperlukan.

a. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Grobogan tercatat sebanyak 47 orang. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai paling banyak laki-laki sejumlah 30 orang, sedangkan perempuan hanya 17 orang. Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kabupaten Grobogan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	6	3	9
2	Litbang	1	2	3
3	Pemosbud	3	0	3
4	Praswilek	1	0	1
5	Rendal	1	0	1
6	Fungsional Tertentu	6	8	14
7	THL	12	4	16
Total (Orang)		30	17	47
Persentase (%)		64	36	100

b. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, jumlah terbanyak adalah S1 sebanyak 51 orang, selanjutnya S2 sebanyak 28 orang, kemudian SLTA sebanyak 13 orang, D III ada 4 orang, dan SLTP 1 orang. Jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan berdasarkan tingkat pendidikan secara rinci tercantum pada Tabel 1. 2.

Tabel 1. 2.
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
BAPPEDA Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D III	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	-	-	2	-	2	5	-	9
2	Litbang	-	-	-	-	2	1	-	3
3	Pemsosbud	-	-	-	-	1	1	1	3
4	Praswilek	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Rendal	-	-	-	-	-	1	-	1
6	Fungsional Tertentu	-	-	-	1	8	5	-	14
7	THL	-	1	4	1	10	-	-	16
Jumlah (Orang)		-	1	6	2	24	13	1	47
Persentase (%)		-	2	13	4	51	28	2	100

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan terbanyak adalah pegawai Golongan III sebanyak 14 orang, selanjutnya golongan IV sebanyak 12 orang, dan golongan II sebanyak 1 orang. Secara lengkap komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1. 3.

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	1	4	4	9
2	Litbang	-	-	3	-	3

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
3	Pemosbud	-	-	1	2	3
4	Praswilek	-	-	-	1	1
5	Rendal	-	-	-	1	1
6	Fungsional Tertentu	-	-	6	4	10
7	THL	-	-	-	-	-
Jumlah (Orang)		-	1	14	12	27
Persentase (%)		-	4	52	44	100

D. SARANA DAN PRASARANA

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel 1. 4.

Tabel 1. 4

Prasarana dan Sarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Komputer	Unit	5		5
2	Monitor	Unit	5		5
3	Printer	Unit	24		24
4	Notebook / Laptop	Unit	31		31

No	Sarpras	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
5	LCD Proyektor	Unit	1		1
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	Unit	1		1
7	AC Split	Unit	23		23
8	Televisi	Unit	6		6
9	Telepon External	Unit	2		2
10	Sound System	Unit	1		1
11	Filling Cabinet	Unit	29		29
12	LAN (Local Net Working)	Jaringan	1		1
13	Kendaraan Roda 4	Unit	7		7
14	Kendaraan Roda 2	Unit	11		11
15	Ruang Sidang	Unit	2		2

E. ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

Isu strategis perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan, dan unsur penelitian dan pengembangan.

Dalam unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda harus mengawal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mencakup

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan memastikan seluruh perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peran strategis lainnya adalah Bappeda memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan, yang merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah; konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi, RPJPN dan RTRW Nasional; konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah tersebut meliputi: Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, Bappeda sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten memiliki peran yang strategis dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda sebagai memiliki peran yang penting untuk mendorong peningkatan inovasi daerah yang mencakup inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Grobogan, isu strategis yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra periode 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengoptimalan koordinasi dan kualitas perumusan tujuan, sasaran strategi, kebijakan yang akan terjabarkan dalam program dan kegiatan Bappeda mendasarkan pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi bagi perencanaan pembangunan, serta data capaian target kinerja sebagai baseline dalam menentukan target pembangunan selanjutnya. Juga diperlukan perencanaan dan penganggaran yang menganut "*e-performance based budgeting*" agar sepenuhnya menerapkan *money follow* program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga diperlukan peningkatan integrasi program dan kegiatan lintas perangkat daerah, baik dalam pengembangan wilayah, pemerintahan, sosial, budaya, maupun ekonomi daerah.

2. Pengoptimalan keselarasan program dan kegiatan yang disusun dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan maupun keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan RPJMD. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Bappeda dengan perangkat daerah untuk menyerap usulan masyarakat berdasarkan usulan renja Perangkat daerah.
3. Pengoptimalan kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah.
Hasil evaluasi pembangunan daerah menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu melakukan transformasi metode untuk menjalankan peran strategis dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penguat kerangka pembangunan daerah.
4. Pengoptimalan pemanfaatan hasil-hasil kajian penelitian dan/atau pengembangan sebagai dasar dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sosial, pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi.
Perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan hasil kajian penelitian dan pengembangan, diantaranya dengan melakukan publikasi dan sosialisasi, agar hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan dalam perumusan kebijakan pembangunan serta penyusunan dokumen perencanaan, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Grobogan.
5. Pengoptimalan fungsi kelitbang dalam memfasilitasi pengembangan dan penerapan inovasi masyarakat dan perangkat daerah.
Perlu dilakukan penciptaan ekosistem inovasi sehingga proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbang lebih optimal. Kolaborasi triple helix antara pemerintah daerah, dunia penelitian, dan dunia usaha yang didukung oleh kapasitas lembaga litbang dan perguruan tinggi yang memadai sebagai sumber inovasi teknologi
6. Pengoptimalan kualitas dan kuantitas SDM serta ketercukupan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun internal.

Dalam konteks pembangunan SDM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu membangun SDM yang tak hanya pekerja keras tapi juga dinamis, produktif, terampil dan menguasai tugas dan fungsinya. Terkait sarana dan prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu mengoptimalkan pemeliharaan, memperbarui, dan pemanfaatan sarana prasarana untuk mendukung kinerja pelayanan.

Sesuai dengan fungsi Bappeda sebagai perangkat daerah, Bappeda juga mempunyai fungsi sebagai koordinator perangkat daerah di Kabupaten Grobogan. Sehingga pada tahun 2024 ke-enam isu strategis yang tertera dalam Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, ditangani oleh Bappeda Kabupaten Grobogan.

1. Pengoptimalan koordinasi dan kualitas perumusan tujuan, sasaran strategi, kebijakan yang akan terjabarkan dalam program dan kegiatan Bappeda mendasarkan pada RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Pengoptimalan keselarasan program dan kegiatan yang disusun dengan program dan kegiatan yang diimplementasikan maupun keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan renja, renstra dengan RPJMD.
3. Pengoptimalan kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah.
4. Pengoptimalan pemanfaatan hasil-hasil kajian penelitian dan/atau pengembangan sebagai dasar dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sosial, pemerintahan, infrastruktur dan ekonomi.
5. Pengoptimalan fungsi kelitbangan dalam memfasilitasi pengembangan dan penerapan inovasi masyarakat dan perangkat daerah.
6. Pengoptimalan kualitas dan kuantitas SDM serta ketercukupan sarana dan prasarana guna mendukung pelayanan kepada Perangkat Daerah maupun internal.

F. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 82);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang; Tugas fungsi dan Stuktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Sarana dan Prasarana, Isu

Strategis Bappeda, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyajian LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang rencana dan target kinerja dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026, rencana dan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, serta Prestasi yang diraih Bappeda Kabupaten Grobogan.

Bab IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

BAB II | 

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Grobogan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Bappeda Kabupaten Grobogan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Bappeda Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Grobogan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2026. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (clarity of direction) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kabupaten Grobogan yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu : **“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”**

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

- | | |
|--------|---|
| Misi 1 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing. |
| Misi 2 | Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana. |

- Misi 3 Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- Misi 5 Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Grobogan yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan mendukung pelaksanaan **Misi ke-4 yaitu Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.**

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan” dan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”. Rumusan tujuan dalam Renstra Bappeda tersebut sudah mengakomodasi pencapaian misi yang dapat didukung oleh Bappeda.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Bappeda Kabupaten Grobogan tersebut, dirumuskan sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Perumusan sasaran telah mengacu RPJMD serta pada tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Grobogan.

Secara rinci keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja Bappeda Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 tercantum pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Matriks Tujuan, Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja Bappeda
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	Indikator Tujuan 1: Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan kinerja	Nilai	21,6	22,2	22,8	23,4	24	24,6
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	82,5	85	87,5	90	92,5	95
	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD	Nilai	sedang	sedang	sedang	sedang	Tinggi	Tinggi
SASARAN 2 : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penerapan Inovasi	%	60	65	70	75	80	85

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	Nilai	B (75.70)	B (76.70)	B (77.20)	B (77.70)	B (78.70)	B (79.70)
	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)
SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	Nilai	B (75.70)	B (76.70)	B (77.20)	B (77.70)	B (78.70)	B (79.70)
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	B (63)	B (65)	B (68)	BB (70)	BB (72)	BB (73,5)

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Bappeda Kabupaten Grobogan telah menetapkan IKU Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum pada Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Namun kemudian dilakukan penajaman tujuan dan sasaran Bappeda, sehingga terjadi perubahan atas IKU yang terdapat pada Renstra, dan kemudian dituangkan dalam Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan Nomor : B/000.7.1.3/66/BAPPEDA/2024 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	1 Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan kinerja	Nilai		Nilai hasil evaluasi AKIP komponen perencanaan kinerja	Renstra Bappeda
	Sasaran 1.1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1.1.1 Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%		Jumlah program perencanaan pembangunan daerah (subkegiatan) dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah (subkegiatan) dalam renstra perangkat daerah yang	Renstra Bappeda

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %	
		1.1.2 Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD	Nilai		Jumlah indikator kinerja sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja sasaran RPJMD dikali 100% (1) Hasil Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) (2) Tinggi (76% ≤ 90%) (3) Sedang (66% ≤ 75%) (4) Rendah (51% ≤ 65%) (5) Sangat rendah (≤ 50%)	Renstra Bappeda
	Sasaran 1.2 : Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan	1.2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%		(Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan tahun n-1 yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di tahun n, dibagi jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di tahun n-1)	Renstra Bappeda

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
					dikali 100%		
		1.2.2	Persentase Penerapan Inovasi	%		(Jumlah inovasi krenova di tahun n dan inovasi OPD di tahun n-1 yang mendapat pendampingan implementasi dan hilirisasi riset tahun n, dibagi jumlah inovasi yang diikutsertakan dalam lomba krenova tahun n serta inovasi perangkat daerah tahun n-1) dikali 100%	Renstra Bappeda
2	Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	Nilai IKM Bappeda	Nilai		Pengukuran IKM sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Renstra Bappeda
		2	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai		Pengukuran SAKIP sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Renstra Bappeda
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan	2.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	Nilai		Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB	Renstra Bappeda

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Kualitas Pelayanan Publik Didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	2.1.2	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai		Penghitungan bobot nilai masing-masing komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, pencapaian sasaran)	Renstra Bappeda

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
TUJUAN 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	Indikator Tujuan 1: Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan kinerja	Nilai	23,4
SASARAN 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90
	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD	Nilai	sedang
SASARAN 1.2 : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100
	Persentase Penerapan	%	75

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
	Inovasi		
TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	Nilai	B (87.70)
	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	BB (70)
SASARAN 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	Nilai	B (87.70)
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB (70)

Sumber: Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Grobogan Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator kinerja yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan serta mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2026, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
TUJUAN 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	Indikator Tujuan 1: Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan kinerja	Nilai	23,4
SASARAN 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90
	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD	Nilai	sedang
SASARAN 1.2 : Meningkatnya kualitas Penelitian dan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET 2024
Pengembangan	Persentase Penerapan Inovasi	%	75
TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	Nilai	B (87.70)
	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai	BB (70)
SASARAN 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	Nilai	B (87.70)
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	BB (70)

Sumber: Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 untuk mencapai sasaran yang dituju meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada DPA sebesar Rp 11.219.679.000,00 (Sebelas milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Berikut rincian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	100%	2.000.000.000
a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	100%	1.523.815.000
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	100%	327.038.000
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersusunnya laporan dan rekomendasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	149.147.000
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	82%	1.450.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	86%	
		Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	86%	
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Sesuai peraturan berlaku	100%	550.000.000
b.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam) Sesuai peraturan berlaku	100%	393.002.000
c.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai peraturan berlaku	100%	506.998.000
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan	100%	600.000.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan		
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	89.832.000
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	100%	55.160.000
c.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	100%	79.072.000
d.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Laporan hasil pelaksanaan kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	61,22%	375.936.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		ersentase Masyarakat dan Perangkat Daerah yang mengikuti Kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	75%	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan keuangan OPD sesuai Standar Kuntansi Pemerintah (SAP)	100%	7.169.679.000
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	100%	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Resiko	100%	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	129.400.000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.848.234.000
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan dan peningkatan kapasitas SDM Pegawai	100%	328.320.000
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana	100%	1.099.030.800

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
		prasarana penunjang pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan rencana	100%	175.784.000
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan laporan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	253.104.200
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	335.806.000
	Jumlah			11.219.679.000

Sumber : DPA Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Selanjutnya Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);

3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda tahun 2024 tidak terdapat perubahan karena baik tujuan, sasaran, indikator kinerja, satuan, dan target tidak berubah. Namun sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Bappeda Tahun 2024, terdapat penambahan alokasi sebesar 636.075.200 (Enam ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang semula sebesar Rp 11.219.679.000,00 (Sebelas milyar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). Rincian program, kegiatan, subkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Program, Kegiatan, Subkegiatan BAPPEDA
Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran APBD Perubahan
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	100%	2.360.000.000
a.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	100%	1.729.655.000
1)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis	Jumlah Dokumen Rancangan Awal	1 dokumen	77.440.000

	Pembangunan Daerah	RPJMD/RKPD Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		
2)	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 dokumen	515.100.000
3)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	134.591.000
4)	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26 Berita Acara	74.163.000
5)	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	417.464.000
6)	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1139 Usulan	49.057.000
6)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	461.840.000
b.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	100%	481.198.000
1)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan	4 Dokumen	228.680.000

		Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
2)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	90 Orang	252.518.000
c.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersusunnya laporan dan rekomendasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	149.147.000
1)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	149.147.000
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	82%	1.450.000.000
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	86%	
		Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	86%	
a.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan	100%	550.000.000

		pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Sesuai peraturan berlaku		
1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	51.960.000
2)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	25.750.000
3)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	28.985.000
4)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	41.750.000
5)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	1 Dokumen	51.960.000

		Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
6)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	74.235.000
7)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	124.110.000
8)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	8 Laporan	151.250.000
b.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sesuai peraturan berlaku	100%	393.002.000

1)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	129.400.000
2)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	13.313.000
3)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	157.894.000
4)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	92.395.000
c.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan Sesuai peraturan berlaku	100%	506.998.000
1)	Koordinasi Penyusunan	Koordinasi	1	51.960.000

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur RPJPD, RPJMD dan RKPD	Dokumen	
2)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	58.434.000
3)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	232.320.000
4)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan	164.284.000
3	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	100%	737.406.000
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan	100%	119.832.000

		pembangunan daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
1)	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 laporan	119.832.000
b.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	100%	135.160.000
1)	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			80.000.000
2)	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	55.160.000
c.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	100%	79.072.000
1)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	1 Dokumen	79.072.000

		Pangan		
d.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Laporan hasil pelaksanaan kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	61,22%	403.342.000
		Persentase Masyarakat dan Perangkat Daerah yang mengikuti Kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	75%	
1)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	181.791.800
2)	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	89.478.000
3)	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8 Laporan	132.072.200
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan keuangan OPD sesuai Standar Kuntansi Pemerintah (SAP)	100%	7.308.348.200
		Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja	100%	

		Perangkat daerah		
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Resiko	100%	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	129.400.000
1)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	51.960.000
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			77.440.000
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	4.597.309.000
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.597.309.000
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan dan peningkatan kapasitas SDM Pegawai	100%	328.320.000
1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	68.320.000

2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	60.000.000
3)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	45 Orang	200.000.000
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.366.060.000
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.000.000
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
4)	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	165.000.000
5)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	750.000.000
6)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.100.000
7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Jumlah Dokumen Dukungan	1 Dokumen	51.960.000

	Elektronik pada SKPD	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan rencana	100%	253.224.000
1)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor	1 Unit	77.440.000
2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	84.489.000
3)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	91.295.000
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan laporan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	253.104.200
1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	36.000.000
2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.500.000
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan	12	80.000.000

	Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	70.604.200
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	380.931.000
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	279.331.000
2)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.600.000
	Jumlah			11.855.754.200

*Sumber : Perubahan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA)
Bappeda Tahun 2024*



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

BAB III | 

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja menjadi salah satu pondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja dalam LKjIP Bappeda dilakukan terhadap indikator sasaran strategis yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Bappeda dan juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Bappeda sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian

rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran. Capaian indikator kinerja dirumuskan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja. Capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian dikelompokkan dalam skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan mengadopsi peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penggambaran capaian kinerja Bappeda Kabupaten Grobogan pada masing-masing sasaran strategis mencakup beberapa hal meliputi :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dibawah, bahwa Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 98,38% dengan kategori Sangat Tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 102,22% atau kategori Sangat Tinggi dan capaian kinerja sasaran 1.2 mencapai 100% atau kategori Sangat Tinggi Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 101,11%, dengan kategori Sangat Tinggi.

Sedangkan Indikator Kinerja Tujuan 2 capaiannya sebesar 106,56% dengan kategori Sangat Tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1

mencapai 106,56% % atau kategori Sangat Tinggi. Untuk perhitungan dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
BAPPEDA Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah Secara Berkelanjutan	Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	23,4	23,02	98,38	Sangat Tinggi	Hasil Evaluasi Kemenpan RB No : B/25/AA.0 5/2024 Tgl. 3 Sept 2024
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	91,76%	102,22%	Sangat Tinggi	PK Ka Bappeda Kab. Grobogan Tahun 2024
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran RPJMD	Sedang	Tinggi	101%	Sangat Tinggi	PK Ka Bappeda Kab. Grobogan Tahun 2024
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	PK Ka Bappeda Kab. Grobogan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
Pengembangan	Persentase Penerapan Inovasi	75%	75%	100%	Sangat Tinggi	PK Ka Bappeda Kab. Grobogan Tahun 2024
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	B (87.70)	B (89.19)	101,70%	Sangat Tinggi	PK Ka Bappeda Kab. Grobogan Tahun 2024
	Nilai SAKIP Bappeda	BB (70)	BB (78)	111,43%	Sangat Tinggi	LHE AKIP Bappeda Tahun 2024
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung Dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	B (87.70)	B (89.19)	101,70%	Sangat Tinggi	PK Ka Bappeda Kab. Grobogan Tahun 2024
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB (70)	BB (78)	111,43%	Sangat Tinggi	LHE AKIP Bappeda Tahun 2024

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya
BAPPEDA Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	2022			2023			2024		
		Target	realisasi	% Capaian	Target	realisasi	% Capaian	Target	realisasi	% Capaian
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah Secara Berkelanjutan	Nilai Sakip Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	22,2	21,41	102,48%	22,8	22,75	99,78%	23,4	23,02	93,38%
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	85%	93,44%	109,93%	87,50%	91,44%	104,50%	90%	92%	102,22%
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran RPJMD	Sedang	Sedang	100%	Sedang	Sedang	100%	Sedang	Tinggi	101%
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penerapan Inovasi	65%	65,63%	100,96%	70%	70%	100%	75%	75%	100%
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	B (76,70)	B (85,30)	131,23%	B (77,20)	B (87,60)	113,47%	B (87,70)	B (89,19)	101,70%
	Nilai SAKIP Bappeda	B (65)	BB (78,52)	121,80%	B (68)	BB (78,52)	115,47%	BB (70)	BB (78)	111,43%
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	B (76,70)	B (85,30)	131,23%	B (77,20)	B (87,60)	113,47%	B (87,70)	B (89,19)	101,70%

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	2022			2023			2024		
		Target	realisasi	% Capaian	Target	realisasi	% Capaian	Target	realisasi	% Capaian
Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung Dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan Yang Baik	Nilai Evaluasi Sakip OPD	B (65)	BB (78,52)	121,80%	B (68)	BB (78,52)	115,47%	BB (70)	BB (78)	111,43%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan tren negatif, yang dibuktikan adanya penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2022 102,48% turun menjadi 99,78% di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 93,38%. Hal ini dikarenakan Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan merupakan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari KemenpanRB. Selanjutnya, capaian kinerja sasaran 1.1 dan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk indikator sasaran 1.2 stabil persentase capaian sebesar 100%.

Sedangkan capaian indikator tujuan 2 terdapat 2 indikator yaitu Nilai IKM dan Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda. Untuk Nilai IKM Bappeda mengalami penurunan dari tahun 2022 mencapai 131,23% dan tahun 2023 turun menjadi 113,47%, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 101,70%. Hal ini dikarenakan ada arahan dari KemenpanRB bahwa target tahun n tidak boleh lebih rendah/minimal harus sama dari capaian tahun sebelumnya, (target tidak harus sama dengan Renstra). Hal ini mengakibatkan capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra

Realisasi capaian kinerja utama Bappeda Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2024 dengan
Target Jangka Menengah (Renstra BAPPEDA)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah Secara Berkelanjutan	Nilai Sakip Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	23,02	24,6	93,58
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistesi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	92%	95%	96,84
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran RPJMD	Tinggi	Tinggi	100,00
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100,00
	Persentase Penerapan Inovasi	75%	85%	88,24
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	B (89,19)	B (79.70)	111,91
	Nilai SAKIP Bappeda	BB (78)	BB (73,5)	106,12
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung Dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) OPD	B (89,19)	B (79.70)	111,91
	Nilai Evaluasi Sakip OPD	BB (78)	BB (73,5)	106,12

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 93,58%, sehingga

untuk potensi mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.1 untuk persentase penjabaran konsistensi program perencanaan pembangunan daerah mencapai 96,84%, sedangkan untuk persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD mencapai 100%. Indikator kinerja sasaran 1.2 untuk persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti 100%, untuk persentase penerapan inovasi 88, 24%.

Sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja tujuan 2 terdiri atas Nilai IKM Bappeda, dan Nilai SAKIP Bappeda. Untuk Nilai IKM Bappeda mencapai 11,91%, sehingga sudah melebihi target jangka menengah, dan tingkat kemajuan indikator sasaran Nilai SAKIP Bappeda mencapai 106,12% sudah melebihi target jangka menengah.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Capaian Kinerja Kabupaten			Persentase Capaian	
		Kabupaten Grobogan	Bappeda Provinsi Jateng	Nasional (Kementerian PPN)	Provinsi	Nasional
1	Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	93,38%	Nihil	Nihil	-	-
2	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung Dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan Yang Baik	101,70%	Nihil	Nihil	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 disampaikan bahwa untuk capaian indikator tujuan yang ada di Bappeda Kabupaten Grobogan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian indikator tujuan di tingkat nasional (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), dan di tingkat provinsi (Bappeda Provinsi Jawa Tengah). Hal ini dikarenakan indikator kinerja tujuan yang ada di Bappeda Kabupaten Grobogan tidak dilakukan pengukuran kinerja di tingkat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan tingkat di tingkat Provinsi Jawa Tengah (Bappeda Provinsi Jawa Tengah).

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan atau kegagalan Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah Secara	Nilai SAKIP Kabupaten Dari Komponen Perencanaan Kinerja	23,4	23,02	98,38	Indikator kinerja belum tercapai sesuai target yang sudah ditentukan. Nilai SAKIP berdasarkan hasil LHE SAKIP dari KemenpanRB	Terus melakukan perbaikan dalam perencanaan kinerja PD.

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Berkelanjutan						
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	91,76%	102,22 %	Indikator kinerja tercapai melebihi target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan	Terus melakukan perbaikan dalam perencanaan pembanguana n daerah
	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran RPJMD	Sedang	Tinggi	101%	Indikator kinerja tercapai melebihi target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan	Terus melakukan koordinasi, komunikasi dengan PD daerah
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Indikator kinerja tercapai sesuai target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan agar hasil penelitian dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan pembangunan	Sosialisasi dokumen kajian hasil penelitian
	Persentase Penerapan Inovasi	75%	75%	100%	Indikator kinerja tercapai sesuai target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan agar penerapan	Dengan melakukan sosialisasi terkait inovasi daerah kepada PD dan stakeholder

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
					inovasi dapat dinikmati oleh masyarakat	terkait
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	B (87.70)	B (89.19)	101,70%	Indikator kinerja tercapai sesuai target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan kualitasnya sebagai pelayan publik	Melakukan kualitas pelayanan public pada Bappeda
	Nilai SAKIP Bappeda	BB (70)	BB (78)	111,43%	Indikator kinerja melebihi target, selalu dipertahankan dengan melengkapi dokumen perencanaan maupun laporan kinerja Bappeda	Pelaporan atau pun kelengkapan SAKIP harus diselesaikan tepat waktu
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung Dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	B (87.70)	B (89.19)	101,70%	Indikator kinerja tercapai sesuai target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan kualitasnya sebagai pelayan publik	Melakukan kualitas pelayanan publik pada Bappeda
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB (70)	BB (78)	111,43%	Indikator kinerja melebihi target, selalu dipertahankan dengan melengkapi dokumen	Pelaporan atau pun kelengkapan SAKIP harus diselesaikan tepat waktu

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
					perencanaan maupun laporan kinerja Bappeda	

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 didapat hasil **“Tidak Efisien”** pada Tujuan I yaitu “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan’ hal ini dikarenakan meski ada sisa anggaran, tetapi target kinerjanya tidak tercapai (nilai realisasi Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan lebih rendah dari target). Namun disampaikan tingkat efisiensi untuk Tujuan 2, dan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 didapat hasil **“Efisien”**. Untuk data disajikan pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
I.	Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	23.4	23,02	93,38%	4.547.406.000	4.460.057.030	98%	-5%	4.246.367.723	(213.689.307)	Tidak Efisien
1.1	Sasaran 1.1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	90%	91,76%	101,96%	3.810.000.000	3.746.100.980	98%	4%	3.884.676.000	138.575.020	Efisien
	a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	2.360.000.000	2.320.006.810	98%	2%	2.360.000.000	39.993.190	Efisien
	1). Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	100%	1.729.655.000	1.699.644.450	98%	2%	1.729.655.000	30.010.550	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	a). Subkegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok	100%	77.440.000	76.258.000	98%	2%	77.440.000	1.182.000	Efisien
	b). Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	3 dok	3 dok	100%	515.100.000	502.445.000	98%	3%	515.100.000	12.655.000	Efisien
	c). Sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	134.591.000	134.383.700	100%	0%	134.591.000	207.300	Efisien
	d). Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	26 Berita Acara	26 Berita Acara	100%	74.163.000	74.043.750	100%	0%	74.163.000	119.250	Efisien
	e). Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	417.464.000	411.299.000	99%	1%	417.464.000	6.165.000	Efisien
	f). Sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1139 Usulan	1139 Usulan	100%	49.057.000	49.012.000	100%	0%	49.057.000	45.000	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	g). Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	100%	461.840.000	452.203.000	98%	2%	461.840.000	9.637.000	Efisien
	2). Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	481.198.000	474.870.360	99%	1%	481.198.000	6.327.640	Efisien
	a). Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok	4 dok	100%	228.680.000	225.257.360	99%	2%	228.680.000	3.422.640	Efisien
	b). Sub kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	90 Orang	90 Orang	100%	252.518.000	249.613.000	99%	1%	252.518.000	2.905.000	Efisien
	3). Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	149.147.000	145.492.000	98%	3%	149.147.000	3.655.000	Efisien
	a). Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	149.147.000	145.492.000	98%	3%	149.147.000	3.655.000	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	a. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	1.450.000.000	1.426.094.170	98%	2%	1.450.000.000	23.905.830	Efisien
	1). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	550.000.000	540.261.560	98%	2%	550.000.000	9.738.440	Efisien
	a). Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	51.960.000	51.921.250	100%	0%	51.960.000	38.750	Efisien
	b). Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28 PD	28 PD	100%	25.750.000	25.668.750	100%	0%	25.750.000	81.250	Efisien
	c). Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	100%	28.985.000	27.708.000	96%	5%	28.985.000	1.277.000	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	d). Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100%	41.750.000	39.879.500	96%	5%	41.750.000	1.870.500	Efisien
	e). Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	51.960.000	51.900.160	100%	0%	51.960.000	59.840	Efisien
	f). Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan	100%	74.235.000	71.362.500	96%	4%	74.235.000	2.872.500	Efisien
	g). Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 PD	7 PD	100%	124.110.000	122.064.500	98%	2%	124.110.000	2.045.500	Efisien
	h). Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8 laporan	8 laporan	100%	151.250.000	149.756.900	99%	1%	151.250.000	1.493.100	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	2). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	393.002.000	389.217.300	99%	1%	393.002.000	3.784.700	Efisien
	a). Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dok	2 dok	100%	129.400.000	128.517.800	99%	1%	129.400.000	882.200	Efisien
	b). Sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Laporan	7 Laporan	100%	13.313.000	13.209.500	99%	1%	13.313.000	103.500	Efisien
	c). Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	7 Laporan	7 Laporan	100%	157.894.000	155.909.000	99%	1%	157.894.000	1.985.000	Efisien
	d). Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	1 laporan	1 laporan	100%	92.395.000	91.581.000	99%	1%	92.395.000	814.000	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	3). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	80%	80%	100%	506.998.000	496.615.310	98%	2%	506.998.000	10.382.690	Efisien
	a). Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	1 dok	100%	51.960.000	51.482.800	99%	1%	51.960.000	477.200	Efisien
	b). Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100%	58.434.000	56.054.000	96%	4%	58.434.000	2.380.000	Efisien
	c). Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	100%	232.320.000	227.085.800	98%	2%	232.320.000	5.234.200	Efisien
	d). Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang wilayah	2 laporan	2 laporan	100%	164.284.000	161.992.710	99%	1%	164.284.000	2.291.290	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
1.2	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	737.406.000	713.956.050	97%	3%	737.406.000	23.449.950	Efisien
	a. Program Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	737.406.000	713.956.050	97%	3%	737.406.000	23.449.950	Efisien
	1). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%	119.832.000	118.366.650	99%	1%	119.832.000	1.465.350	Efisien
	a). Sub kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 dokumen	2 dokumen	100%	119.832.000	118.366.650	99%	1%	119.832.000	1.465.350	Efisien
	2). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%	100%	135.160.000	133.403.000	99%	1%	135.160.000	1.757.000	Efisien
	a). Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	2 dokumen	2 dokumen	100%	80.000.000	79.539.500	99%	1%	80.000.000	460.500	Efisien
	b). Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	55.160.000	53.863.500	98%	2%	55.160.000	1.296.500	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	3). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	100%	100%	79.072.000	74.925.000	95%	6%	79.072.000	4.147.000	Efisien
	a). Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100%	79.072.000	74.925.000	95%	6%	79.072.000	4.147.000	Efisien
	4). Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	61%	61%	100%	403.342.000	387.261.400	96%	4%	403.342.000	16.080.600	Efisien
	a). Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	181.791.800	172.988.600	95%	5%	181.791.800	8.803.200	Efisien
	b). Sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	100%	89.478.000	87.422.000	98%	2%	89.478.000	2.056.000	Efisien
	c). Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	8 Laporan	8 Laporan	100%	132.072.200	126.850.800	96%	4%	132.072.200	5.221.400	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
II.	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100%	100%	100%	12.396.956.400	11.755.617.888	95%	5%	12.396.956.400	641.338.512	Efisien
2.1.	Sasaran 2.1 : Meningkatnya kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran pemerintahan yang Baik	100%	100%	100%	12.396.956.400	11.755.617.888	95%	5%	12.396.956.400	641.338.512	Efisien
	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	7.308.348.200	6.980.902.831	96%	5%	7.308.348.200	327.445.369	Efisien
	1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	129.400.000	127.041.500	98%	2%	129.400.000	2.358.500	Efisien
	a). Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	51.960.000	50.950.000	98%	2%	51.960.000	1.010.000	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	b). Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	77.440.000	76.091.500	98%	2%	77.440.000	1.348.500	Efisien
	2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	4.597.309.000	4.296.025.427	93%	7%	4.597.309.000	301.283.573	Efisien
	a). Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	100%	4.597.309.000	4.296.025.427	93%	7%	4.597.309.000	301.283.573	Efisien
	3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	328.320.000	320.401.990	98%	2%	328.320.000	7.918.010	Efisien
	a). Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100%	68.320.000	66.721.990	98%	2%	68.320.000	1.598.010	Efisien
	b). Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	10 orang	100%	60.000.000	59.625.000	99%	1%	60.000.000	375.000	Efisien
	c). Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 orang	45 orang	100%	200.000.000	194.055.000	97%	3%	200.000.000	5.945.000	Efisien
	4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	1.366.060.000	1.362.712.825	100%	0%	1.366.060.000	3.347.175	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	a). Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	100%	40.000.000	40.000.000	100%	0%	40.000.000	-	Impas
	b). Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	100%	300.000.000	299.844.050	100%	0%	300.000.000	155.950	Efisien
	c). Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	100%	50.000.000	49.827.040	100%	0%	50.000.000	172.960	Efisien
	d). Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	100%	165.000.000	163.602.235	99%	1%	165.000.000	1.397.765	Efisien
	e). Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	750.000.000	750.000.000	100%	0%	750.000.000	-	Impas
	f). Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	9.100.000	9.100.000	100%	0%	9.100.000	-	Impas
	g). Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	51.960.000	50.339.500	97%	3%	51.960.000	1.620.500	Efisien
	5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	253.224.000	250.941.605	99%	1%	253.224.000	2.282.395	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	a). Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	77.440.000	76.818.175	99%	1%	77.440.000	621.825	Efisien
	b). Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 unit	7 unit	100%	84.489.000	83.584.000	99%	1%	84.489.000	905.000	Efisien
	c). Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	100%	91.295.000	90.539.430	99%	1%	91.295.000	755.570	Efisien
	6). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	253.104.200	243.712.338	96%	4%	253.104.200	9.391.862	Efisien
	a). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	36.000.000	33.322.500	93%	8%	36.000.000	2.677.500	Efisien
	b). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%	66.500.000	63.246.638	95%	5%	66.500.000	3.253.362	Efisien
	c). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	80.000.000	79.479.000	99%	1%	80.000.000	521.000	Efisien
	d). Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	70.604.200	67.664.200	96%	4%	70.604.200	2.940.000	Efisien

No	Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
	7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	380.931.000	380.067.146	100%	0%	380.931.000	863.854	Efisien
	a). Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17 unit	17 unit	100%	279.331.000	278.979.967	100%	0%	279.331.000	351.033	Efisien
	b). Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	101.600.000	101.087.179	99%	1%	101.600.000	512.821	Efisien
	JUMLAH				11.855.754.200	11.440.959.861			11.855.754.200	414.794.339	

7. Analisis tujuan, sasaran, program, kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
BAPPEDA Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan kinerja	98,38%	Menunjang
Sasaran1. 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase penjabaran konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	101,96%	Menunjang
a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	100%	Menunjang
1). Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Tersusunya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai peraturan berlaku	100%	Menunjang
2). Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi yang Terakomodir didalam Sistem Informasi Berbasis Elektronik	100%	Menunjang
3). Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan dan Rekomendasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Sesuai Peraturan yang Berlaku	100%	Menunjang
b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	104,50%	Menunjang
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	90,44%	Menunjang
1). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai Peraturan Berlaku	100%	Menunjang
2). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai Peraturan Berlaku	100%	Menunjang
3). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai Peraturan Berlaku	100%	Menunjang
Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
	Persentase Penerapan Inovasi	100%	Menunjang
a. Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	100%	Menunjang
1). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	Menunjang
2). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	100%	Menunjang
3). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	100%	Menunjang
4). Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Laporan hasil Pelaksanaan Kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Persentase Masyarakat dan Perangkat Daerah yang Mengikuti Kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	Menunjang
Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai IKM Bappeda	114,79%	Menunjang
	Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	111,43%	Menunjang
Sasaran 2.1 : Meningkatnya kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	114,79%	Menunjang
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	111,43%	Menunjang
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan keuangan OPD sesuai Standar Kuntansi Pemerintah (SAP)	100%	Menunjang
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah	100%	Menunjang
	Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Resiko	100%	Menunjang
1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	100%	Menunjang
2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyelesaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Menunjang
3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pegawai	100%	Menunjang
4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan dan Rencana	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
6). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang Terpelihara	100%	Menunjang

Sasaran Strategis 1.1

Indikator sasaran 1.1 Persentase penjabaran konsistensi program perencanaan pembangunan daerah dipengaruhi antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran RPJMD;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah;
4. Belum terintegrasinya data yang digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;

Indikator sasaran 1.1 Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD, dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya peran Bappeda dalam mengawal dokumen perencanaan agar ada kesesuaian antara program RKPD terhadap RPJMD.
2. Adanya peran Bappeda dalam mengawal kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga ada kesesuaian program APBD terhadap RKPD.

Program yang Menunjang pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran strategis 1.1 meliputi 2 program yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kinerja program ini diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional dengan realisasi 100% dari target 100%.

- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kinerja program ini diukur dengan 3 indikator, meliputi: (1) Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA dengan capaian sebesar 100% (2) Capaian indikator Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan capaian sebesar 90,44%; (3) Capaian indikator Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan capaian sebesar 104,50%.

Sasaran Strategis 1.2

Pada sasaran strategis 1.2. terdapat 2 (dua) Indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti, dan indikator Persentase penerapan inovasi .

Persentase rekomendasi hasil penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti tergolong baik, dipengaruhi oleh:

1. Penetapan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah
2. Adanya pengawalan dari Bappeda terhadap implementasi atas rekomendasi dari hasil penelitian dalam pengembangan kedalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja indikator Persentase penerapan inovasi daerah dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya peran Bappeda dalam mendorong seluruh masyarakat dan perangkat daerah untuk mengembangkan inovasi daerah.
2. Adanya inisiasi serta partisipasi dari masyarakat dan perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi daerah dalam memecahkan permasalahan pembangunan daerah.

3. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan daerah dan anggota DPRD dalam mendorong peningkatan inovasi pembangunan daerah.

Pada sasaran strategis 1.2 didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan. Pencapaian kinerja program diukur dari indikator Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan dengan capaian sebesar 100%.

Sasaran Strategis 2.1

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja indikator sasaran strategis 2.1. indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda dipengaruhi oleh:

1. Sinergitas dan Koordinasi yang baik antara Bappeda dengan OPD serta Stakeholder terkait perencanaan.
2. Penerapan Standar Operasional Prosedur yang baik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
3. Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan yang baik.

Indicator sasaran strategis 2.1 Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman yang baik atas peraturan perundang-undangan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Komitmen dan Kesungguhan Organisasi untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Dukungan APIP dan Tim Evaluator yang Proaktif melakukan evaluasi dan reuiu terhadap akuntabilitas kinerja Organisasi.

Program yang menunjang pada asaran strategis 2.1 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pencapaian kinerja program diukur dengan 3 indikator, meliputi: (1) Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan capaian sebesar 100%; (2) Capaian indikator Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian

100%; (3) Capaian indikator Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Resiko dengan capaian 100%.

C. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Grobogan tahun 2024 terserap dengan baik, hal ini terlihat dari anggaran APBD perubahan Bappeda sebesar Rp 11.855.754.200,00 dapat terealisasi sebesar Rp 11.440.959.861,00 atau 96,50%. Seluruh kegiatan semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Perincian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Bappeda Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Tahun 2024 Perubahan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.360.000.000	2.320.006.810	98,31%
1). Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.729.655.000	1.699.644.450	98,26%
2). Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	481.198.000	474870360	98,69%
3). Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	149.147.000	145492000	97,55%
b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000	1.426.094.170	98,35%
1). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	550.000.000	540.261.560	98,23%

Program/ Kegiatan	Tahun 2024 Perubahan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3). Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	506.998.000	496.615.310	97,95%
c. Program Penelitian dan Pengembangan	737.406.000	713.956.050	96,82%
1). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	119.832.000	118.366.650	98,78%
2). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	135.160.000	133.403.000	98,70%
3). Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	79.072.000	74.925.000	94,76%
4). Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	403.342.000	387.261.400	96,01%
d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.308.348.200	6.980.902.831	95,52%
1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.400.000	127.041.500	98,18%
2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.597.309.000	4.296.025.427	93,45%
3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	328.320.000	320.401.990	97,59%
4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.366.060.000	1.362.712.825	99,75%
5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.224.000	250.941.605	99,10%
6). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.104.200	243.712.338	96,29%
7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.931.000	380.067.146	99,77%
JUMLAH	11.855.754.200	11.440.959.861	96,50%



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

BAB IV | 
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Bappeda pada tahun 2024 adalah sangat tinggi yang dapat dilihat dari capaian seluruh indikator sasaran strategis. Diketahui dari sejumlah 6 indikator sasaran strategis, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sasaran strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan) diukur melalui sebanyak 2 indikator yaitu Persentase penjabaran konsistensi program perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi sebesar 91,76% dari target 90%, dan Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD dengan nilai realisasi Tinggi dari target nilai Sedang. Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang telah baik dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Sangat Berhasil.
 - b. Sasaran strategis 2 (Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan) diukur melalui sebanyak 2 indikator yaitu Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%, dan Persentase Penerapan Inovasi dengan realisasi sebesar 75% dari target 75%. Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang telah baik dan telah mencapai target yang ditetapkan, dengan predikat tinggi
 - c. Sasaran strategis 3 (Meningkatnya kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran pemerintah yang Baik) diukur melalui sebanyak 2 indikator yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda dengan realisasi sebesar B (89,19) dari target B (87,70),

dan Nilai SAKIP Bappeda dengan realisasi BB (78,00) dari target B (70,00). Dengan demikian kedua indikator memiliki kinerja yang telah baik dan telah mencapai target yang ditetapkan, dengan predikat Sangat Tinggi.

2. Pencapaian realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Grobogan tahun 2024 tergolong baik, hal ini terlihat dari anggaran APBD perubahan Bappeda sebesar Rp 11.855.754.200 dapat terealisasi sebesar Rp 11.440.959.861,00 atau 96,50%. Seluruh sub kegiatan semuanya dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil pengukuran kinerja ini menjadi bahan evaluasi kinerja untuk digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya agar memiliki kinerja yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat, tidak hanya bagi internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, tetapi juga masyarakat Kabupaten Grobogan secara keseluruhan.

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan kinerja Bappeda Kabupaten Grobogan, meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran selaras dengan RPJMD dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan peran Bappeda dalam mengawal pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah melalui implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
3. Mendorong seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

4. Meningkatkan penyediaan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penyelesaian isu strategis pembangunan daerah.
5. Meningkatkan upaya koordinasi dengan perangkat daerah lain dalam mencapai indikator tujuan Bappeda.

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GROBOGAN**



ATISYLDANI, S.T., M.ENG
Pembina Tk I
NIP. 197908052005011007



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2024

BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN

LAMPIRAN | 



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan S. Parman Nomor 23, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon(0292) 421084 Faksimile (0292)421084,
Laman bappeda.grobogan.go.id, Posel bappeda@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/000.8.6.3/7/BAPPEDA GROBOGAN/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, maka berdasarkan peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka di bentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan tentang pembentukan Tim penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi pemerintah;
4. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, Pelapor kinerja , dan Tata cara Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Grobogan;

6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam data lampiran.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud adalah:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kerja , Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP OPD, Cascading Kinerja, dan Rencana Aksi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
 2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP OPD, Cascading Kinerja, dan Rencana Aksi;
 3. Menyusun dokumen Rencana Strategis , Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, LKjIP OPD, Cascading Kinerja, Rencana Aksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Menyampaikan dokumen SAKIP tersebut pada kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal Januari 2024
Kepala Bappeda,

}\${ttd_pengirim}



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Afi Wildani S.T., M. Eng.
Pembina Tk. I
NIP 19790805 200501 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Asisten Pemerintahan;
4. Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Grobogan.

LAMPRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
 GROBOGAN NOMOR : B/000.8.6.3/7/BAPPEDA
 GROBOGAN/2024
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN

ANGGOTA TIM PENYUSUN
 LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Subbagian Perencanaan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Prasarana Wilayah & Ekonomi	Anggota
5	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan & Pengendalian	Anggota
7	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan	Anggota
8	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Pengembangan IPTEK Bappeda Kab. Grobogan	Anggota
9	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Pemerintahan & Pemberdayaan Bappeda Kab. Grobogan	Anggota
10	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Kesejahteraan Sosia Bappeda Kab. Grobogan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Perekonomian Bappeda Kab. Grobogan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan	Anggota
13	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Pendidikan Mental & Spiritual Bappeda Kab. Grobogan	Anggota
14	Perencana Ahli Muda Subkoordinator Bidang Pengendalian & Evaluasi Bappeda Kab. Grobogan	Anggota
15	Perencana Ahli Pertama Bidang Prasarana Wilayah & Ekonomi	Anggota
16	Perencana Ahli Pertama Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	Anggota
17	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan & Pengendalian	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama Bidang Penelitian & Pengembangan	Anggota
19	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
20	Analisis Pengkajian Iptek	Anggota

21	Analisis Keuangan	Anggota
22	Analisis Tata Usaha	Anggota

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 4 Januari 2024
Kepala Bappeda,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Afi Wildani S.T., M. Eng.
Pembina Tk. I
NIP 19790805 200501 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan S. Parman Nomor 23, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,
Telepon(0292) 421084 Faksimile (0292)421084,
Laman bappeda.grobogan.go.id, Posel bappeda@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/000.7.1.3/66/BAPPEDA/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022-2026

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2022-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 20 Februari 2024
Kepala Bappeda,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Afi Wildani S.T., M. Eng.
Pembina Tk. I
NIP 19790805 200501 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/000.7.1.3/66/BAPPEDA/2024
TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022-2026

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Urusan Penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan
3. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.
4. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - e. pengelolaan kesekretariatan Badan;
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bappeda,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Afi Wildani S.T., M. Eng.
Pembina Tk. I

NIP 19790805 200501 1 007

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BAPPED KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : B/000.7.1.3/66/BAPPEDA/2024

TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang			Nilai SAKIP Kabupaten dari komponen perencanaan kinerja	nilai	Nilai hasil evaluasi AKIP komponen perencanaan kinerja	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
Berkualitas Didukung Pengembangan Kelitbangan & Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan		Persentase Penjabaran Konsistensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	Jumlah program perencanaan pembangunan daerah (subkegiatan) dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah (subkegiatan) dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	persen	Jumlah Program pembangunan daerah yang selaras dengan program nasional dibagi jumlah program pembangunan daerah keseluruhan dikali 100 %	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	persen	(Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang seharusnya disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku) dikali 100%	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Berlaku	Kabid Perencanaan & Pengendalian Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	dokumen		Tersusunnya dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen telaahan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	dokumen		Tersedianya Dokumen Telaahan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Kegiatan Konsultasi Publik yang dilaksanakan	kegiatan		Terselenggaranya Kegiatan Konsultasi Publik	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Forum SKPD/Lintas SKPD Bidang yang dilaksanakan	kegiatan		Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	kegiatan		Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan yang disusun	dokumen		Tersedianya Dokumen Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	persen	Jumlah data dan informasi yang diakomodir dibagi jumlah data dan informasi yang seharusnya terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Memadai untuk Keperluan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Kabid Perencanaan & Pengendalian Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang		Terlaksananya Pembinaan Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi
		5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersusunnya laporan dan rekomendasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	persen	Jumlah laporan dan rekomendasi perencanaan pengendalian dan evaluasi yang disusun dibagi dengan laporan dan rekomendasi perencanaan pengendalian dan evaluasi yang seharusnya tersusun sesuai peraturan yang berlaku	Terpenuhinya Laporan dan Rekomendasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesuai Peraturan yang Berlaku	Kabid Perencanaan & Pengendalian Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Subkoordinator Pengendalian & Evaluasi

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			Status kinerja pembangunan daerah	nilai	<p>Gradasi nilai (skala intensitas) kinerja yang merupakan penilaian rata-rata capaian kinerja daerah dalam RPJMD terhadap target kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD:</p> <p>(1) Hasil Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) (2) Tinggi (76% ≤ 90%) Gradasi sangat tinggi dan tinggi (tercapai/terlampai) menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.</p> <p>(3) Sedang (66% ≤ 75%) Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal (perlu upaya keras)</p> <p>(4) Rendah (51% ≤ 65%) (5) Sangat rendah (≤ 50%) Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan (sulit tercapai)</p>		Kepala Bappeda Kab. Grobogan
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah,		Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD	nilai	Jumlah indikator kinerja sasaran RPJMD yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja	Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda untuk merumuskan kebijakan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan				sasaran RPJMD dikali 100% (1) Hasil Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) (2) Tinggi (76% ≤ 90%) (3) Sedang (66% ≤ 75%) (4) Rendah (51% ≤ 65%) (5) Sangat rendah (≤ 50%)	perencanaan pembangunan daerah	
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	persen	Rata-rata capaian kinerja program RPJMD bidang perekonomian dan SDA terhadap target kinerja program RPJMD	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi & SDA dalam mewujudkan target kinerja program RPJMD yang direncanakan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		persen	Rata-rata capaian kinerja program RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terhadap target kinerja program RPJMD	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang infrastruktur & Kewilayahan dalam mewujudkan target kinerja program RPJMD yang direncanakan		
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		persen	Rata-rata capaian kinerja program RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terhadap target kinerja program RPJMD	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam mewujudkan target kinerja program RPJMD yang direncanakan		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase tersusunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sesuai peraturan berlaku	persen	(Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang seharusnya disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku) dikali 100%	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai Peraturan Berlaku	Kabid. Prasarana Wilayah & Ekonomi Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Subkoordinator Perekonomian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		5.01.03.1.02.04 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.1.02.05. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.1.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Subkoordinator Perekonomian

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah Bidang SDA			Perangkat Daerah Bidang SDA	
		5.01.03.1.02.08 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase tersusunya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sesuai peraturan berlaku	persen	(Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang seharusnya disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku) dikali 100%	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai Peraturan Berlaku	Kabid. Prasarana Wilayah & Ekonomi Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan
		5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan
		5.01.03.1.03.04 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Subkoordinator Perekonomian
		5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.03.1.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan
		5.01.03.1.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan
		5.01.03.1.03.08 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang kewilayahan	Subkoordinator Pengembangan Wilayah, Pemukiman & Pertanahan
		5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Sesuai peraturan berlaku	%	(Jumlah dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang telah disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang seharusnya disusun di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai Peraturan Berlaku	Kabid. Pemosbud Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkoordinator Pemerintahan & Pemberdayaan
		5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangka t Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Subkoordinator Pemerintahan & Pemberdayaan
		5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Subkoordinator Pemerintahan & Pemberdayaan
		5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Subkoordinator Pemerintahan & Pemberdayaan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
		5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Subkoordinator Pendidikan Mental & Sepiritual
		5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
			Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	persen	Jumlah hasil kelitbangan yang di implementasikan dibagi jumlah kelitbangan dalam program perencanaan pembangunan daerah kali 100%	Meningkatkan Pengembangan Kelitbangan secara Berkelanjutan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
			Indeks inovasi daerah	Skor	Kategori pemerintah daerah dalam inovasi: Instrumen IGA 1) Terinovatif 2) Sangat Inovatif 3) Inovatif 4) Kurang Inovatif	Meningkatkan Inovasi Daerah secara Berkelanjutan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan serta Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin		Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	persen	(Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dibagi jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan) dikali 100%	Meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
			Persentase Penerapan Inovasi	persen	(Jumlah inovasi yang mendapat pendampingan implementasi dan hilirisasi riset dibagi jumlah inovasi yang diikutsertakan dalam lomba krenova serta inovasi	Meningkatkan Implementasi Hasil Kelitbangan Iptekin	Kepala Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
					perangkat daerah) dikali 100%		
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	Persen	(Jumlah kajian yang dilaksanakan pada tahun berjalan + jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova + jumlah peserta yang mengikuti lomba inovasi OPD yang didiseminasikan dibagi jumlah keseluruhan)	Meningkatkan Kontribusi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Aplikatif bagi Perencanaan Pembangunan serta Fasilitasi terhadap Pengembangan Inovasi Daerah	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
		5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	Persen	(Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan berdasarkan kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun dibagi jumlah kebutuhan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang seharusnya disusun) dikali 100%	Terpenuhinya Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	Kabid Litbang Bappeda Kab. Grobogan
		5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan	persen	(Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan berdasarkan kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun dibagi jumlah kebutuhan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang seharusnya disusun) dikali 100%	'Terpenuhinya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kabid Litbang Bappeda Kab. Grobogan
		5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Subkoordinator Pengembangan IPTEK

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.05.02.2.02.06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persen	(Jumlah dokumen Penelitian dan pengembangan berdasarkan kebutuhan perencanaan pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun dibagi jumlah kebutuhan penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang seharusnya disusun) dikali 100%	Terpenuhinya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan Rencana dan Kebutuhan	Kabid Litbang Bappeda Kab. Grobogan
		5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.03.12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Laporan hasil pelaksanaan kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persen	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi dibagi jumlah kompetisi dikali 100	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kabid Litbang Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase Masyarakat dan Perangkat Daerah yang mengikuti Kompetisi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persen	Jumlah masyarakat dan perangkat daerah yang lolos seleksi dibagi jumlah masyarakat dan perangkat daerah yang mendaftar kompetisi pengembangan inovasi dan teknologi dikali 100		Kabid Litbang Bappeda Kab. Grobogan
		5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
		5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Subkoordinator Pengembangan IPTEK
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Nilai IKM Bappeda	nilai	Pengukuran IKM sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk meningkatkan kinerja/kualitas	Kepala Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Nilai SAKIP Bappeda	nilai	Pengukuran SAKIP sesuai peraturan perundangan yang berlaku	pelayanan publik yang diberikan Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mewujudkan good governance	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
			Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik Didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang Baik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) OPD	nilai	Menggunakan rumus dan metode dari KemenPAN-RB
	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	nilai			Penghitungan bobot nilai masing-masing komponen (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, pencapaian sasaran)	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mewujudkan good governance	
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		%	Jumlah laporan keuangan memenuhi standar SAP dibagi jumlah laporan keuangan kali 100	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai kondisi laporan keuangan untuk mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan OPD	Kepala Bappeda Kab. Grobogan
		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Rutin Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	Rata2 capaian kinerja kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, pemeliharaan BMD	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk melayani administrasi Perkantoran dalam mendukung akuntabilitas, pengelolaan		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
						keuangan dan kinerja perencanaan pembangunan	
			Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian Manajemen Resiko	%	Jumlah dokumen penilaian manajemen risiko meliputi dokumen MR strategis & operasional OPD yang disusun dibagi jumlah dokumen yang seharusnya disusun kali 100	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk meningkatkan penerapan sistem pengendalian intern OPD	
		5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Untuk Menyediakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan
		5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Untuk Menyediakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Kasubbag Perencanaan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Untuk Menyediakan laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk menungjag gaji dan tunjangan pegawai	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		Untuk Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan pelayanan dan peningkatan kapasitas SDM Pegawai	%	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk meningkatkan Kapasitas SDM Pegawai	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		Untuk Menyediakan Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Untuk Menyediakan Pakaian Dinas pegawai	Kasubbag Umum

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
						beserta Perlengkapannya	
		5.01.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kasubbag Perencanaan
		5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kasubbag Perencanaan
		5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk melayani administrasi Perkantoran	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran perencanaan pembangunan	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		Tersedianya Bahan/Material	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.06.10 Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen		Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kasubbag Umum

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
			Berbasis Elektronik pada SKPD				
		5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan rencana	%	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran bekerja	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan
		5.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan laporan realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat untuk mendukung kelancaran bekerja	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk mendukung kelancaran bekerja	Sekretaris Bappeda Kab. Grobogan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Satuan	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum
		5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum

Kepala Bappeda,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Afi Wildani S.T., M. Eng.
Pembina Tk. I
NIP 19790805 200501 1 007

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afi Wildani, ST, M.Eng

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Grobogan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sri Sumarni, S.H, M.M

Jabatan : Bupati Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwodadi, 20 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Sri Sumarni, S.H, M, M

Pihak Pertama,

Afi Wildani, ST, M.Eng
Pembina Tk. I

NIP. 197908052005011007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Penetapan APBD	Perubahan APBD
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase penjabaran konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	90%	90%
		Persentase capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan sasaran RPJMD	sedang	sedang
2.	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Persentase Penerapan Inovasi	75%	75%
3.	Meningkatnya kinerja Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik didukung dengan Manajemen Administrasi Perkantoran pemerintahan yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	B (77,70)	B (77,70)
		Nilai Evaluasi SAKIP Bappeda	BB (70)	BB (70)

No.	Program	Anggaran (Rp).		Keterangan
		Penetapan 2024	Perubahan 2024	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.169.679.000	7.308.348.200	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.000.000.000	2.360.000.000	APBD + Banprov
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.450.000.000	1.450.000.000	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	600.000.000	737.406.000	APBD
Jumlah Program		11.219.679.000	11.855.754.200	

Purwodadi, 20 Oktober 2024

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI, S.H, M, M

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN GROBOGAN,

AFI WILDANI, ST, M.ENG
Pembina Tk. I
NIP. 197908052005011007